



EDISI SELASA 13 OKTOBER 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY**02**GOVERNMENT TODAY
Karhutla 3 Bulan, Status Bencana Nasional
Tak Kunjung Diputuskan**05**NUSANTARA
Tunjangan Guru Tertahan Tiga Bulan**10**LISTSTYLE
Tren Outfit Halloween 2026: KPop Demon
Hunters hingga Nikki 'Obsession'

MENGUJI JEJAK DUGAAN PASAL SELUNDUPAN GIBRAN

SOAL PENGECEUALIAN IJAZAH SMA, AHMAD DOLI KURNIA-HASYIM ASY'ARI BEDA PENDAPAT

Dugaan adanya 'pasal selundupan' dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden kembali menjadi sorotan. Ahmad Doli Kurnia menyatakan Pasal 18 ayat (3) tidak tercantum dalam draf yang diterima Komisi II DPR, sementara mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah ketentuan itu disisipkan tanpa pembahasan. Perbedaan keterangan tersebut menempatkan dokumen dan risalah rapat September 2023 sebagai kunci untuk menguji bagaimana aturan itu dirumuskan hingga ditetapkan. Polemik ini tidak berhenti pada adu keterangan Doli dan Hasyim. Pada 12 Oktober 2026, DKPP mengumumkan menerima dua aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap pimpinan KPU dan Bawaslu terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Pada hari yang sama, Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) juga meminta Fraksi Golkar mendorong penggunaan hak angket DPR. Doli menyatakan usulan tersebut akan dipertimbangkan, tetapi menegaskan DPR tidak berwenang menguji ulang putusan Mahkamah Konstitusi. Kini, persoalan utamanya adalah pembuktian, apakah ketentuan yang dipersoalkan telah dibahas dan disepakati dalam rapat bersama DPR, sebagaimana dinyatakan Hasyim? Atau terdapat perbedaan antara draf yang diterima DPR dan naskah final PKPU, sebagaimana dipersoalkan Doli? Aduan etik yang masih dalam tahap verifikasi dan usulan hak angket yang belum menjadi keputusan resmi DPR kini tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penelusuran draf, surat-menyerut, risalah, rekaman rapat, serta kesimpulan akankah membuktikan? BERSAMBUNG HAL.11

Doli Kurnia (DPR):

Menuduh KPU menyusupkan "pasal selundupan" di PKPU tanpa persetujuan DPR demi meloloskan Gibran.

Soal pasal 18 ayat (3):

Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Hasyim Asy'ari (Eks Ketua KPU)

Menyerang balik DPR dengan dalih aturan sudah disepakati di rapat 2023. Ia menyindir DPR "munafik" dan mencoba cuci tangan.

DOLI KURNIA

"ANDA
MENJELASKAN
DIRI SENDIRI"
(12 Oktober
2026)

HASYIM ASY'ARI

"LUPA BOLEH,
MUNAFIK JANGAN!"
(11 Oktober 2026)

Klaim Bukti

Doli mengklaim punya rekaman video dan dokumen otentik yang membuktikan pasal tersebut tak pernah ada di draf DPR.

Klaim Bukti

Doli menyoroti dua kali pemecatan Hasyim akibat pelanggaran etik dan mempertanyakan kompetensinya sebagai Komisaris BUMN.

KARHUTLA 3 BULAN, STATUS BENCANA NASIONAL TAK KUNJUNG DIPUTUSKAN

Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran tersebut. Namun, anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mendesak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penetapan status bencana nasional karena kebakaran dan paparan asap disebut telah berlangsung selama tiga bulan serta mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bencana nasional.

"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," kata Dudung sesuai rapat terbatas di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dudung mengatakan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut enam provinsi menjadi fokus penanganan karhutla. Dua wilayah yang disebut secara khusus adalah Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pemerintah juga memprioritaskan kawasan Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, terutama area sekitar taman nasional yang menjadi habitat satwa dilindungi.

"Kemudian ada lagi yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah yaitu adalah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ," ujar Dudung.

Menurut Dudung, operasi pemadaman menggunakan helikopter telah dilaksanakan. Namun, operasi darat lebih banyak diandalkan karena asap tebal menyulitkan penanganan dari udara. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menilai pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal dan menyampaikan terima kasih kepada personel TNI, Polri, serta seluruh pihak yang terlibat.

"Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin, beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit baik TNI, Polri termasuk seluruh komponen yang terlibat di sana," kata Dudung.

Pernyataan pemerintah itu berhadapan dengan desakan agar penanganan karhutla ditingkatkan. Daniel Johan menilai dampak kebakaran tidak lagi terbatas pada kerusakan hutan dan lahan. Paparan asap berkepanjangan, menurut dia, turut mengancam kesehatan, mengganggu kegiatan belajar-mengajar, menghambat penerbangan, dan menekan perekonomian warga.

"Kondisi saat ini sudah di ambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, 3 bulan karhutla sudah



Petugas kesehatan memeriksa kondisi pasien anak penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) imbas karhutla yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Charitas Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (9/10). (dok.ant)

seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak. Penderitaan apalagi yang kau dustakan," kata Daniel kepada wartawan, Senin (12/10).

Daniel meminta pemerintah mengambil langkah strategis, termasuk mempertimbangkan penetapan status bencana nasional. Ia menilai lamanya kebakaran dan luas dampaknya membutuhkan respons yang lebih terkoordinasi.

"Dengan waktu yang sudah 3 bulan ini pemerintah harus mengambil langkah strategis, salah satu menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional," ujarnya.

Pernyataan mengenai bencana internasional tersebut merupakan penilaian Daniel, bukan penetapan status resmi. Meski demikian, ia menekankan bahwa dampak asap dapat melintasi batas negara dan membutuhkan kerja sama regional. Daniel meminta pemerintah membuka diri terhadap bantuan negara lain, termasuk Malaysia.

"Ini bukan menunjukkan pemerintah lemah tapi ini masalah yang sangat besar, dan berdampak antar negara yang butuh kerja sama antar kawasan. Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri

untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan Karhutla ini," kata Daniel.

Ia juga meminta Presiden Prabowo melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak dan orang lanjut usia, dengan mempertimbangkan evakuasi ke wilayah yang lebih aman apabila paparan asap membahayakan kesehatan.

"Kami atas nama rakyat yang terdampak memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini dengan menetapkan status kebencanaan ini sebagai bencana nasional, bila perlu anak-anak kecil orang tua diungsikan dulu ke daerah yang aman dari asap, ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia," tuturnya.

Daniel menilai situasi tersebut telah berkembang menjadi persoalan lintas sektor. "Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla," pungkasnya.

Data BNPB menunjukkan penanganan karhutla pada 2026 mencakup sejumlah provinsi prioritas dengan pengerahan personel serta operasi darat dan udara. Dalam laporan perkembangan situasi pada

28 September 2026, BNPB mencatat luas lahan terbakar dalam perkembangan penanganan saat itu mencapai 527,6 hektare di enam provinsi prioritas. Sebanyak 431,53 hektare telah ditangani melalui operasi darat seluas 369,03 hektare dan operasi udara 62,5 hektare. Adapun 96,07 hektare masih belum padam pada periode pelaporan tersebut.

Angka itu menggambarkan perkembangan penanganan pada tanggal yang disebutkan, bukan akumulasi seluruh lahan yang terbakar sepanjang tahun. Dashboard BNPB untuk karhutla 2026 juga menampilkan angka indikatif akumulasi luas lahan terbakar sebesar 89.534,30 hektare per 26 September 2026. Kedua angka tersebut memiliki konteks pengukuran berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pemadaman.

Perbedaan angka dan periode pelaporan tersebut penting dalam membaca skala persoalan. Untuk mengetahui kondisi terkini per 12 Oktober, diperlukan pembaruan data resmi mengenai luas lahan terbakar; titik api, wilayah terdampak, korban atau gangguan kesehatan, serta sisa area yang belum padam. (gus,ist,ant,kim/dya)

Survei Celios-Kabinet Bayangan

75% WARGA STRES HADAPI KEBIJAKAN PRABOWO

Survei Celios dan Kabinet Bayangan juga mencatat 82 persen responden mengeluhkan beban pajak dan pungutan pemerintah. Sebanyak 55 persen pemilih Prabowo pada Pemilu 2024 menyatakan tidak akan memilihnya kembali. Sebanyak 75 persen masyarakat yang menjadi responden survei Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama tim Kabinet Bayangan mengaku stres menghadapi kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, sedikitnya 67 persen responden juga menyatakan stres terhadap perilaku Prabowo. Temuan ini menjadi salah satu indikator dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyampaikan temuan tersebut dalam paparan survei secara daring pada Minggu (11/10/2026). Menurut dia, pertanyaan mengenai tekanan psikologis itu diajukan kepada 1.142 responden dari kelompok masyarakat umum.

"Jawabannya, 75 persen merasa stres dengan kebijakan pemerintah dan secara spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto," kata Bhima dikutip Senin (12/10/2026).

Survei tersebut juga memperlihatkan rendahnya penilaian responden terhadap kinerja presiden dan wakil presiden. Masyarakat umum memberi Prabowo skor 4,6 dari skala 10, sedangkan Gibran memperoleh 4,9. Penilaian kelompok ahli lebih rendah: Prabowo mendapat skor 2,8 dan Gibran 2,2.

"Jadi keduanya sama-sama memiliki skor di bawah angka 5," ujar Bhima, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran dalam Kabinet Bayangan.

Penilaian tersebut tidak hanya menyangkut persepsi terhadap kepemimpinan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan ekonomi yang dirasakan rumah tangga. Sebanyak 82 persen responden mengeluhkan beban pajak dan pungutan pemerintah yang dianggap terlalu memberatkan. Sementara itu, 78 persen menganggap kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai persoalan mendesak.

Sebanyak 53 persen responden menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Sebanyak 31 persen menilai keadaan ekonomi keluarga tidak berubah, sedangkan 16 persen menyebut kondisi mereka membaik.

"Dampaknya, 53 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi rumah tangga dibandingkan setahun lalu adalah lebih buruk," tutur Bhima.

Survei ini juga mencatat indikasi melemahnya dukungan di antara pemilih Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024. Sebanyak 55 persen responden yang sebelumnya memilih Prabowo menyatakan tidak akan memilihnya



Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

kembali pada pemilihan presiden mendatang. Sebanyak 27 persen menyatakan masih akan memilihnya, sementara 19 persen lainnya belum menentukan pilihan atau tidak tahu.

Angka tersebut menunjukkan adanya jarak antara pilihan politik pada pemilu sebelumnya dan niat memilih kembali yang dinyatakan responden saat survei dilakukan. Namun, temuan ini tidak dengan sendirinya memastikan perubahan perilaku pemilih pada pemilu berikutnya.

Celios dan Kabinet Bayangan menggunakan dua pendekatan survei yang dirancang secara terpisah untuk masyarakat umum dan kelompok ahli.

Peneliti Celios, Wahyu Media Askar, menjelaskan bahwa riset ini melanjutkan evaluasi terhadap 100 hari dan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Proses penelitian berlangsung selama tiga bulan, mulai dari penyusunan kuesioner, pengumpulan data, hingga penulisan laporan.

Media Askar mengatakan penelitian tersebut dilakukan secara independen tanpa pendanaan donor. "Dalam konteks tata kelola riset ini, kami tidak dibiayai oleh lembaga atau donor mana pun. Semata-mata ini adalah kontribusi akademik yang kami lakukan untuk mengevaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa angka yang dihasilkan merupakan ekspresi masyarakat dan para ahli yang dilibatkan, bukan angka yang ditentukan peneliti.

Peneliti Celios sekaligus Menteri Pertanian dan Keadaulatan Pangan Kabinet Bayangan, Isnawati Hidayah, menjelaskan bahwa survei masyarakat umum melibatkan 1.142 responden dari

seluruh provinsi melalui Meta Ads. Penelitian menggunakan metode non-probability sampling dengan pembobotan (weighting) agar komposisi responden disesuaikan dengan populasi berusia di atas 17 tahun.

Adapun survei kelompok ahli melibatkan 129 responden dari beragam disiplin ilmu dengan teknik snowball sampling. Instrumen kuesioner diuji menggunakan Cronbach's Alpha, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), dan Bartlett's test untuk memeriksa reliabilitas dan validitasnya.

Isnawati menyatakan hasil pengujian tersebut konsisten menunjukkan bahwa instrumen survei dapat diandalkan dan valid untuk menjawab tujuan penelitian.

Meski demikian, penggunaan non-probability sampling pada survei masyarakat umum perlu menjadi pertimbangan ketika membaca hasilnya. Karena responden tidak dipilih melalui pengambilan sampel acak berbasis probabilitas, hasil survei tidak dapat diperlakukan begitu saja sebagai estimasi yang mewakili seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat kesalahan sampling tertentu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat skor terendah dalam survei evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama Kabinet Bayangan. Bahlil memperoleh skor -159, disusul Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dengan skor -158 dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan skor -103. (gus,tmp,rls/dya)

10 PEJABAT KABINET DENGAN SKOR NEGATIF HASIL SURVEI CELIOS DAN KABINET BAYANGAN



-159

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM



-158

Natalius Pigai, Menteri HAM



-103

Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan



-47

Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional



-43

Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan



-24

Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN



-17

Pratikno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



-17

Saifullah Yusuf, Menteri Sosial



-16

Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat



-16

Fadli Zon, Menteri Kebudayaan

HARGA CABAI TEMBUS RP200 RIBU/KG, INFLASI PANGAN BERLANJUT

Harga cabai merah dan cabai rawit melonjak di sejumlah wilayah Indonesia pada pekan kedua Oktober 2026. Di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, harga cabai rawit dilaporkan mencapai Rp200.000 per kilogram (kg). Sementara itu, harga cabai merah di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, menembus Rp193.333 per kg. Lonjakan tersebut menambah tekanan harga pangan di tengah ancaman kemarau panjang dan gangguan pasokan dari sentra produksi.

HARGA RATA-RATA DAN PERUBAHAN CABAI 12 OKTOBER 2026

Cabai Merah Besar

- Harga: Rp 73.550 / kg
- Perubahan: Naik 9,53% (+Rp 6.400)

Cabai Merah Keriting

- Harga: Rp 88.350 / kg
- Perubahan: Naik 10,09% (+Rp 8.100)

Cabai Rawit Hijau

- Harga: Rp 78.750 / kg
- Perubahan: Naik 7,88% (+Rp 5.750)

Cabai Rawit Merah

- Harga: Rp 105.500 / kg
- Perubahan: Naik 3,74% (+Rp 3.800)



(Ilustrasi) Kenaikan harga cabai diprediksi masih akan berlangsung. (dok)

Sejumlah daerah mencatat harga cabai rawit jauh di atas rata-rata nasional. Di Teluk Bintuni, Papua Barat, harganya mencapai Rp156.000 per kg. Di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, harga berada di kisaran Rp135.000 per kg, sedangkan di Kabupaten Buru, Maluku, mencapai Rp120.000 per kg. Perbedaan harga antardaerah ini memperlihatkan persoalan pasokan dan distribusi yang tidak merata, terutama di wilayah

yang jauh dari sentra produksi.

Amalia juga menyoroti lonjakan harga cabai rawit di Sulawesi Utara. Inflasi bulanan komoditas tersebut di provinsi itu mencapai 117 persen. Kondisi ini dipicu berkurangnya pasokan dari Gorontalo akibat kemarau panjang, sementara produksi lokal Sulawesi Utara belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. BPS mengingatkan pemerintah daerah

agar mewaspadai kenaikan harga yang masih berlanjut meskipun tingkat harga sudah tinggi.

"Harganya levelnya tinggi, sudah mahal Pak, tapi masih mengalami peningkatan harga IPH. Jadi ini perlu kita waspadai," kata Amalia.

Tekanan harga cabai juga tercermin dalam inflasi September 2026. BPS mencatat inflasi bulanan cabai rawit mencapai 24,93 persen, melonjak dari 6,47 persen pada Agustus. Komoditas ini menyumbang 0,08 poin persentase terhadap inflasi nasional. Sementara itu, cabai merah mengalami inflasi bulanan sebesar 16,77 persen. Keduanya menjadi bagian dari kelompok harga bergejolak atau volatile food, yang pergerakannya sangat dipengaruhi kondisi produksi dan pasokan.

Data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia yang dikutip Senin (12/10/2026) menunjukkan, tekanan cabai pada September juga terlihat di tingkat produsen, grosir, hingga eceran. Harga cabai rawit merah naik 39 persen menjadi Rp92.505 per kg dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara cabai rawit hijau naik 18 persen menjadi Rp65.068 per kg.

Secara terperinci, harga cabai rawit merah di tingkat produsen meningkat 25 persen menjadi Rp55.139 per kg. Di tingkat grosir, harganya naik 45 persen menjadi Rp75.743 per kg, sedangkan di tingkat eceran meningkat 39 persen menjadi Rp92.505 per kg. Perbedaan kenaikan di setiap mata rantai perdagangan menunjukkan bahwa tekanan harga tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga pergerakan barang hingga sampai ke konsumen. (tin, ktn, istt/dya)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, harga rata-rata nasional cabai merah pada minggu kedua Oktober mencapai Rp67.313 per kg. Angka ini naik 17,3 persen dibandingkan September 2026 dan telah melampaui harga acuan pemerintah (HAP). Kenaikan juga terjadi di 314 kabupaten/kota.

"Secara nasional harga cabai merah berada di Rp 67.313 per kilo yang sudah di atas HAP, dan saat ini seperti saya sampaikan, 314 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga cabai merah," ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Berdasarkan paparan BPS, harga cabai merah tertinggi tercatat di Halmahera Timur sebesar Rp193.333 per kg, disusul Kabupaten Nduga sebesar Rp172.000 per kg. Adapun harga rata-rata nasional cabai rawit mencapai Rp88.138 per kg, naik 11,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sebanyak 268 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga komoditas tersebut, dengan rentang harga Rp28.500 hingga Rp200.000 per kg.

BPS: Daya Beli Masih Kuat, Konsumsi Bergeser ke Wisata

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi masyarakat Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen selama semester I 2026. Namun, pola belanja masyarakat mulai bergeser, dengan pengeluaran untuk transportasi, hotel, dan restoran menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi seiring perubahan gaya hidup dan meningkatnya mobilitas. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perubahan tersebut telah teridentifikasi sejak tahun lalu dan semakin terlihat pada paruh pertama 2026.

Amalia menjelaskan, pertumbuhan konsumsi pada sektor hotel dan restoran tercatat di atas 6 persen. Sementara itu, sektor transportasi juga menunjukkan perkembangan positif. "Jadi kalau tadi kita perhatikan konsumsi untuk restoran dan hotel itu tumbuhnya di atas 6 persen dan

konsumsi untuk transportasi karena ini menyangkut mobilitas masyarakat itu juga tumbuh relatif ini," ujarnya.

Menurut Amalia, tren tersebut menunjukkan perubahan preferensi masyarakat dalam mengalokasikan pengeluaran. Konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pembelian barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga semakin diarahkan pada perjalanan, pariwisata, dan aktivitas di luar rumah. "Karena sekarang terlihat konsumsi masyarakat lebih tumbuh, pertumbuhannya lebih tinggi untuk transportasi restoran dan hotel. Nah ini karena memang pola konsumsi masyarakatnya yang lebih pada mobilitas, kemudian travelling, itu yang terekam dalam data kami," katanya.

Selain perubahan jenis pengeluaran, BPS mencermati pergeseran saluran belanja dari toko fisik ke transaksi elektronik.

Perubahan ini perlu diperhitungkan dalam membaca perkembangan konsumsi rumah tangga. Penurunan aktivitas penjualan di saluran tertentu tidak serta-merta menunjukkan pelemahan daya beli karena transaksi dapat berpindah ke platform digital.

BPS menilai pertumbuhan konsumsi di atas 5 persen selama semester I 2026 menjadi salah satu indikator daya beli masyarakat masih relatif kuat. "Daya beli masyarakat di Indonesia ini berdasarkan catatan BPS itu memang masih kuat karena selama satu semester itu masih tumbuh di atas 5 persen konsumsi masyarakat dan yang tadi yang terlihat oleh rekaman data kami adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat karena dipengaruhi oleh gaya hidup yang berbeda," tutur Amalia. (tin, ist, rls/dya)

TUNJANGAN GURU TERTAHAN TIGA BULAN

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan tunjangan profesi guru (TPG) yang disebut belum dibayarkan selama tiga bulan. Ia memberi tenggat paling lambat satu pekan agar tunjangan yang menjadi hak guru tersebut segera masuk ke rekening penerima.

Desakan itu muncul setelah Komisi X DPR menerima banyak keluhan dari guru mengenai tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan.

"Ya saya berharap paling telat satu minggu harus sudah dikirimkan ke guru-guru kita. Untuk apa ditahan, kan anggarannya sudah ada," kata Lalu kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Lalu, keluhan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk pesan singkat dan WhatsApp. Ia menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengajukan surat permohonan pencairan anggaran kepada Kementerian Keuangan, tetapi pembayaran belum terealisasi.

Lalu meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara menelusuri posisi surat pengajuan tersebut sekaligus mencari tahu penyebab pencairan belum berjalan. Ia menegaskan bahwa persoalan itu perlu segera diselesaikan, terlebih anggaran tunjangan disebut telah disepakati DPR bersama pemerintah.

"Kalau Pak Menkeu yang baru belum membaca surat ini, silakan cari. Cari surat ini mandeknya di mana. Yang jelas, guru-guru kita hari ini 3 bulan belum terbayarkan tunjangan



Siswa di beberapa kota Pulau Sumatera mulai melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring sejak Rabu (9/9/2026) akibat kondisi udara dan kabut asap karhutla. (dok.is)

profesi atau tunjangan sertifikasinya," ujar Lalu.

Ia juga meminta pemerintah memangkas prosedur birokrasi apabila proses administrasi menjadi penghambat pembayaran. "Kalau memang birokasinya terlalu jelimet, ya tolong potonglah birokrasi ini. Jangan sampai guru-guru kita dikorbankan," katanya.

Persoalan keterlambatan TPG tersebut sebelumnya juga diakui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti. Dalam acara Wardah Inspiring Educators 2026 di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 September 2026, Mu'ti mengatakan telah menerima laporan mengenai guru

yang tunjangannya belum cair selama tiga bulan.

"Saya tahu ada yang tiga bulan tunjangannya belum cair dan laporannya sudah sampai ke saya," kata Mu'ti, pada 30 September 2026. Saat itu, ia berharap pembayaran dapat dilakukan pada Oktober sehingga guru menerima gaji beserta tunjangan yang dirapel.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, juga menyatakan tunjangan yang tertahan akan dicairkan dalam waktu dekat. Dalam keterangannya kepada detikEdu pada 1 Oktober 2026, Nunuk mengatakan, "Ya, dalam waktu dekat ini akan cair. Ya (di awal-awal bulan Oktober 2026)." Ia

meminta guru bersabar dan memastikan hak penerima dibayarkan sesuai ketentuan.

"Mohon bersabar, akan diterimakan semua sesuai haknya," ujar Nunuk. Ia juga mengimbau guru yang data pada laman Info GTK belum valid agar segera melengkapinya untuk membantu kelancaran proses pencairan.

Di sisi lain, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyoroti proses validasi sebagai salah satu bagian mekanisme pembayaran yang perlu disederhanakan. Perwakilan PGRI Wijaya meminta pemerintah menyederhanakan validasi pemenuhan jam mengajar dan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP), yang menjadi dasar pencairan TPG.

"Sederhanakan proses validasi, baik pemenuhan jam mengajar dan penerbitan SKTP sebagai dasar pencairan TPG. Skema TPG melekat terhadap gaji bulanan yang tidak perlu menunggu proses yang panjang," kata Wijaya.

PGRI juga meminta pemerintah membangun sistem validasi dan pembayaran yang menjamin tunjangan dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah. Wijaya menyebut TPG menjadi salah satu tumpuan penghasilan yang dinantikan guru selain gaji pokok. (tin,rls,kum/dya)

242 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Diangkat Mulai Januari 2027

Pemerintah berencana mengangkat 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mulai 1 Januari 2027. Pengangkatan dilakukan tanpa seleksi ulang dan menjadi bagian dari penataan status kepegawaian guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan pengangkatan tersebut akan dilakukan secara otomatis. Setelah dialihkan, para guru itu juga akan berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat.

"Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat," ujar Mu'ti, dikutip dari laman resmi Kemendikdasmen, Senin (12/10/2026).

Kebijakan tersebut berbeda dari rencana pengangkatan guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah membuka kesempatan bagi guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi PNS secara bertahap mulai 2027. Dengan demikian, pengalihan status 242.482 guru PPPK paruh waktu tidak dilakukan melalui mekanisme seleksi yang sama dengan pengangkatan menjadi PNS.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, saat ini terdapat 935.316 guru berstatus PPPK. Namun, pemerintah belum merinci dalam keterangan tersebut jumlah guru yang akan mengikuti seleksi PNS pada setiap tahap maupun jadwal pelaksanaannya.

Penataan status kepegawaian itu juga berkaitan dengan alokasi anggaran pendidikan tahun depan. Berdasarkan surat Menteri Keuangan, pagu anggaran Kemendikdasmen pada 2027 ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun. Nilai tersebut bertambah Rp28 triliun dibandingkan pagu anggaran sebelumnya.

Mu'ti menyebut tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mengembalikan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan serta mendukung pembayaran gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

"Alokasi anggaran Kemendikdasmen difokuskan untuk mendanai beberapa Program Kerja Prioritas Nasional dan program Prioritas Kementerian antara lain, Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, inisiatif awal untuk pelaksanaan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, bantuan perlengkapan sekolah, Sekolah Nasional Terintegrasi, Studio Guru, Digitalisasi Pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, gaji dan tunjangan PPPK guru," kata Mu'ti. (gus,rls,ant/dya)

Pembahasan Payung Hukum Kabel Utilitas Bawah Tanah Kota Malang Ditarget Tahun Depan

Ilustrasi: Kabel utilitas melintang di dekat jembatan penyeberangan orang (JPO) Kayutangan Heritage, menjadi kawasan prioritas penataan ducting. (Santi/Lentera)



MALANG - DPRD Kota Malang menargetkan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang ducting atau penanaman kabel utilitas bawah tanah rampung pada akhir 2026. Penyusunan yang dianggarkan melalui

Perubahan APBD 2026, ini menjadi tahap awal agar ranperda tersebut dapat masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 dan dibahas pada tahun yang sama.

"Di PAK 2026 ini kami mendorong naskah akademiknya dulu sehingga ketika nanti itu sudah ada, akan masuk dalam Propemperda 2027. Sehingga di 2027 sudah masuk dalam list, nanti kami bisa berjalan untuk

pembahasan ranperda ductingnya," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Senin (12/10/2026).

Ditegaskannya, Ranperda Ducting menjadi salah satu isu prioritas yang

diperjuangkan DPRD Kota Malang. Ia menyebut, secara prinsip, dorongan tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Dito menjelaskan, wacana penataan kabel utilitas melalui sistem ducting telah muncul sejak tahun sebelumnya. DPRD menilai penataan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan estetika kota, keselamatan, serta kenyamanan masyarakat.

Melalui regulasi khusus, penataan kabel di Kota Malang diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, dengan mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur dan karakteristik setiap kawasan.

Namun, Dito mengakui pembangunan ducting merupakan pekerjaan infrastruktur berskala besar yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Karena itu, keterlibatan pihak swasta atau pihak ketiga dinilai perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaannya.

"Ducting ini kan infrastruktur besar, berbiaya besar. Artinya memang dengan ranperda ini tentu kami juga mendorong Pemkot melibatkan pihak swasta, pihak ketiga," katanya.

Selain skema kerja sama, Ranperda Ducting nantinya diharapkan dapat mengatur pembagian wilayah pengerjaan, termasuk kawasan yang dapat ditangani langsung oleh Pemkot Malang dan kawasan yang berpotensi dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Koordinasi dengan perusahaan telekomunikasi juga menjadi salah satu aspek yang dinilai penting. "Dengan demikian, penataan kabel utilitas dapat dilakukan secara bertahap melalui penentuan kawasan prioritas," kata Dito.

Dalam penyusunan regulasi, pemetaan kawasan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ketua Fraksi Nasdem-PSI ini menyebut, penataan nantinya tidak hanya berkaitan dengan penerapan sistem ducting, tetapi juga penentuan kawasan yang membutuhkan penataan melalui sistem lain, seperti single tower. (Santi/Dya)

2027 Kepanjen Creative Center Diharapkan Terealisasi

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyiapkan Kepanjen Convention Center (KCC) sebagai pusat pameran untuk memperluas akses pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fasilitas yang direncanakan berdiri di atas lahan seluas 1,1 hektare di Jalan Panji, Kecamatan Kepanjen, tersebut ditargetkan terealisasi pada 2027.

"Selain menjadi ruang promosi produk lokal, gedung KCC akan difungsikan sebagai tempat business matching, mempertemukan pelaku usaha secara langsung dengan calon pembeli (buyers) untuk membuka peluang kerja sama dan transaksi bisnis," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar, dalam keterangan resminya yang diterima pada Senin (12/10/2026).

Menurutnya, penyiapan KCC menjadi salah satu langkah Pemkab Malang dalam memperkuat pemasaran produk lokal. Untuk mendukung rencana pembangunan tersebut, Budiar berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) dapat memberikan dukungan terhadap penyediaan fasilitas KCC.

"Upaya ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperluas

jaringan pembeli, tidak hanya di pasar daerah, tetapi juga ke tingkat nasional hingga internasional," kata Budiar.

Keberadaan KCC nantinya juga diharapkan memperkuat pemasaran melalui kanal digital. Untuk mendukung upaya tersebut, lanjut Budiar, Pemkab Malang telah merencanakan pelatihan pembuatan situs web bagi pelaku UMKM yang diharapkan dapat difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang.

Dijelaskannya, pemasaran digital dapat membantu produk unggulan daerah memiliki identitas daring yang jelas sehingga lebih mudah ditemukan konsumen. "Terlebih dengan promosi yang dilakukan melalui KCC diharapkan dapat diperkuat dengan pemanfaatan kanal digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas," katanya.

Sejalan dengan rencana tersebut, Pemkab Malang juga terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, dan fasilitasi bantuan peralatan produksi. Dukungan terhadap legalitas usaha serta kemudahan perizinan investasi sesuai ketentuan yang berlaku turut menjadi

bagian dari pengembangan ekonomi daerah.

"Kami melalui dinas-dinas terkait juga terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan, lokakarya, dan fasilitasi bantuan peralatan produksi," jelas mantan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang tersebut.

Penguatan akses pemasaran dan kapasitas usaha tersebut diharapkan dapat membantu produk unggulan Kabupaten Malang menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam hal ini, Budiar juga menyebutkan sejumlah produk daerah bahkan telah menembus pasar ekspor, di antaranya bunga krisan, mebel, serta olahan singkong atau puding beku dari Kecamatan Pakis yang dipasarkan ke Belanda.

Produk olahan singkong tersebut menjadi salah satu contoh peningkatan nilai tambah melalui inovasi pengolahan dan pengemasan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, singkong

Ilustrasi: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar, meninjau salah satu stan pelaku UMKM kriya dan fashion Kabupaten Malang. (foto: Prokopim Kab. Malang)



yang semula dijual sekitar Rp5.000 per kilogram disebut dapat memiliki nilai jual hingga Rp250.000 per kilogram setelah diolah menjadi produk beku untuk pasar luar negeri.

"Oleh karena itu, dengan penyiapan KCC, penguatan pemasaran digital, dan kolaborasi dengan sektor swasta, kami berharap pelaku UMKM semakin memiliki akses promosi sehingga mampu meningkatkan daya saing serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan," pungkasnya. (Santi/Dya)

Buntut Serangan Houthi ke Bandara Riyadh SEJUMLAH NEGARA LARANG WARGANYA KE ARAB SAUDI

Sejumlah negara mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga negaranya yang hendak berkunjung ke Arab Saudi menyusul rentetan serangan yang dikaitkan dengan kelompok Houthi asal Yaman. Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang termasuk negara yang memperketat imbauan keselamatan di tengah meningkatnya ancaman terhadap bandara dan infrastruktur sipil di kerajaan tersebut.



Rekaman pengawasan memperlihatkan orang-orang yang duduk di area tunggu saat serangan terjadi, di lokasi yang disebutkan sebagai Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (10/10/2026). (ist)

Peringatan itu muncul setelah serangan terhadap sejumlah bandara Saudi, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Serangan pada Sabtu (10/10/2026) menewaskan 13 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya, menurut laporan Reuters. Pada Minggu (11/10/2026), sebuah proyektil kembali menghantam terminal bandara tersebut.

Insiden susulan itu menewaskan seorang warga negara Pakistan dan melukai 11 orang lainnya. Rentetan serangan tersebut mengganggu operasional penerbangan dan meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik.

Australia menjadi salah satu negara yang memperbarui peringatan perjalanannya pada Senin (12/10). Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia meminta warganya tidak bepergian ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Pemerintah Australia juga meminta warga mempertimbangkan kembali perjalanan melalui bandara-bandara lain di Arab Saudi karena situasi keamanan yang memburuk.

Dalam pembaruan panduan perjalanan di laman Smartraveller, pemerintah Australia menyatakan masih menyarankan warganya untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan bepergian ke Arab Saudi secara keseluruhan.

"Kami kini menyarankan agar warga tidak bepergian ke Bandara

Internasional King Khalid di Riyadh karena insiden keamanan baru-baru ini telah mengganggu operasional bandara," dikutip dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT).

Warga yang tetap melakukan perjalanan diminta memastikan status penerbangan kepada maskapai sebelum berangkat menuju bandara. Mereka juga diimbau mengikuti arahan otoritas setempat dan meminimalkan waktu berada di bandara.

Selandia Baru mengambil langkah serupa. Kementerian Luar Negeri negara itu melarang warganya bepergian ke Bandara Internasional King Khalid serta wilayah Najran, Jazan, dan Asir. Pemerintah juga meminta warga menghindari perjalanan yang tidak mendesak ke Arab Saudi secara keseluruhan.

Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (MFAT) mengeluarkan imbauan, "Jangan melakukan perjalanan ke Najran, Jazan, dan Asir dengan alasan apa pun."

Peringatan tersebut didasarkan pada risiko keamanan yang meningkat, termasuk kemungkinan serangan terhadap fasilitas sipil dan energi. Pemerintah Selandia Baru mengingatkan bahwa penutupan wilayah udara dan gangguan penerbangan dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga berdampak terhadap

warga yang berada di Arab Saudi maupun mereka yang sedang merencanakan perjalanan ke negara tersebut.

Korea Selatan bahkan merekomendasikan warga negaranya yang berada di Arab Saudi untuk meninggalkan negara itu, kecuali jika memiliki urusan penting yang mengharuskan mereka tetap tinggal. Pemerintah Korea Selatan juga menyarankan pembatalan perjalanan bagi warga yang berencana berkunjung.

Sementara itu, Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (FCDO) meminta warga Inggris menghindari perjalanan ke Jeddah dan Dammam serta ke bandara-bandara di Arab Saudi, kecuali untuk keperluan mendesak. Dalam pembaruan panduannya, pemerintah Inggris secara khusus meminta warga menghindari Bandara Internasional King Khalid sampai keamanan

operasionalnya dipastikan.

"FCDO menyarankan agar warga menghindari semua perjalanan yang tidak esensial ke kota Jeddah dan Dammam serta ke seluruh bandara di Arab Saudi, kecuali Bandara Internasional Madinah."

Peringatan perjalanan juga datang dari Amerika Serikat dan Kanada. Kedutaan Besar AS di Riyadh meminta warga Amerika mempertimbangkan kembali perjalanan ke Arab Saudi karena ancaman serangan rudal dan drone, termasuk serangan yang dikaitkan dengan Iran dan Houthi. Pemerintah Kanada mengeluarkan imbauan agar warganya menghindari perjalanan yang tidak esensial ke seluruh wilayah Arab Saudi.

Jepang turut masuk dalam daftar negara yang memperingatkan warganya mengenai risiko perjalanan ke kerajaan tersebut, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera pada Senin (12/10).

Di tengah gelombang peringatan perjalanan tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh menyatakan belum menerima identifikasi WNI yang menjadi korban serangan di Bandara Internasional King Khalid hingga Minggu (11/10), pukul 19.00 waktu setempat.

Asst. Deputy Communication & Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan mengatakan, penerbangan langsung dari Jakarta menuju Jeddah dan Madinah masih berjalan normal.

"Bandara Internasional Soekarno-Hatta memastikan operasional penerbangan langsung dari Indonesia menuju Jeddah dan Madinah, Arab Saudi, hingga saat ini berjalan normal dan lancar di tengah perkembangan situasi di Riyadh," kata Yudistiawan dalam keterangannya, Senin (12/10/2026). (gus ist,rtr cna/dya)



Tangan Sering Kesemutan saat Malam?

Kenali Tanda Gangguan Saraf

Tangan kesemutan setelah tertidih saat tidur umumnya dapat membaik ketika posisi tubuh diubah. Namun, jika keluhan muncul berulang, terutama pada malam hari hingga membuat seseorang terbangun, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian.

Kesemutan atau kebas bukan selalu pertanda penyakit serius. Meski demikian, keluhan yang terus berulang dapat mengindikasikan adanya tekanan atau gangguan pada saraf. Karena itu, penting mengenali pola kesemutan, bagian tangan yang terdampak, serta gejala lain yang menyertainya.

5 GERAKAN RINGAN UNTUK MEREDAKAN KESEMUTAN TANGAN

1. Ubah Posisi Tangan

Lepaskan tekanan pada tangan dan ubah posisi duduk atau tidur secara perlahan.

2. Buka dan Kepalkan Jari

Rentangkan jari-jari tangan, lalu kepalkan perlahan. Ulangi 5-10 kali tanpa memaksakan gerakan.

3. Gerakkan Pergelangan Tangan

Tekuk pergelangan tangan perlahan ke atas dan ke bawah dalam rentang yang nyaman.

4. Goyangkan Tangan Perlahan

Goyangkan tangan dengan lembut selama beberapa detik untuk membantu meredakan sensasi kebas akibat tekanan sementara.

5. Luruskan Siku dan Rilekskan Bahu

Luruskan siku secara perlahan, turunkan bahu, lalu rilekskan lengan tanpa menarik atau meregangkan secara paksa.

PENTING!

-Hentikan gerakan jika muncul nyeri atau kesemutan bertambah parah.
-Jika kesemutan sering berulang, mengganggu tidur, atau disertai kelemahan tangan, periksakan diri ke dokter.

Dokter spesialis neurologi, dr. Puspasari, Sp.N, FIOM, FEEG, FPSG, F.Neuromnologi, FEMG, KHS, menjelaskan bahwa salah satu penyebab kesemutan berulang pada tangan adalah Carpal Tunnel Syndrome (CTS). Kondisi ini terjadi ketika saraf median yang melewati terowongan sempit di pergelangan tangan mengalami tekanan.

"Keluhan CTS biasanya berupa kesemutan atau kebas pada ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan sebagian jari manis. Keluhan ini sering lebih terasa pada malam hari dan bahkan dapat membuat pasien terbangun dari tidur," kata Puspasari, dikutip dari ANTARA.

Pada kondisi yang lebih lanjut, CTS dapat menyebabkan kelemahan tangan. Penderitanya mungkin lebih mudah menjatuhkan benda atau kesulitan melakukan gerakan yang membutuhkan ketelitian. Kesemutan akibat CTS terkadang berkurang setelah tangan digoyangkan atau dikibaskan, tetapi perbaikan sementara tersebut tidak memastikan penyebab keluhan.

Bisa dari Saraf Leher

Selain CTS, kesemutan pada tangan dapat berkaitan dengan radikulopati servikal, yaitu kondisi ketika akar saraf di leher tertekan atau mengalami iritasi. Keluhan dapat berupa nyeri yang menjalar dari leher ke bahu, lengan, hingga jari-jari tangan. Namun, gangguan ini tidak selalu disertai nyeri leher yang berat. Perubahan pada tulang belakang, penyempitan jalur saraf, atau masalah pada bantalan antarruas tulang belakang dapat menjadi penyebabnya. Gejala bergantung pada saraf yang terdampak.

Lokasi Menjadi Petunjuk

Menurut Puspasari, lokasi kesemutan dapat membantu dokter memperkirakan sumber gangguan saraf, tetapi tidak cukup untuk memastikan diagnosis. Pemeriksaan dilakukan dengan menilai pola keluhan, kekuatan otot, refleksi, serta bagian tangan atau lengan yang mengalami gangguan rasa.

Pada kondisi tertentu, dokter dapat menyarankan pemeriksaan Electromyography/Nerve Conduction Study (EMG/NCS). NCS menilai penghantaran sinyal listrik melalui saraf, sedangkan EMG mengevaluasi aktivitas listrik otot. Kedua pemeriksaan tersebut dapat membantu mengidentifikasi lokasi dan tingkat gangguan saraf. Pemeriksaan klinis dan pencitraan seperti MRI juga dapat digunakan sesuai kebutuhan untuk melengkapi penilaian.

Kapan Harus Periksa?

Kesemutan yang muncul sesaat setelah tangan tertidih dan segera membaik ketika posisi tubuh diubah umumnya tidak perlu langsung dikhawatirkan. Sebaliknya, pemeriksaan medis perlu dipertimbangkan jika keluhan terus berulang, semakin sering, mengganggu tidur, tidak kunjung membaik, disertai nyeri menjalar, atau menyebabkan tangan melemah.

Puspasari menegaskan, "Kesemutan

merupakan gejala, bukan diagnosis. Mengetahui sumber dan lokasi gangguan saraf merupakan langkah penting untuk menentukan penanganan yang sesuai."

Jika kebas atau kelemahan muncul mendadak, terutama disertai wajah mencong, kesulitan berbicara, gangguan keseimbangan, atau kelemahan pada satu sisi tubuh, segera cari pertolongan medis darurat karena gejala tersebut dapat menandakan stroke.

Mengenali pola kesemutan dapat membantu menentukan kapan seseorang perlu mencari pertolongan. Namun, penentuan penyebab dan penanganan tetap memerlukan pemeriksaan tenaga medis, bukan hanya berdasarkan jari atau bagian tangan yang terasa kebas. (Farist/dya)



2027, Matahari Buatan China Ditarget Rampung



Proyek BEST di Hefei memasuki tahap perakitan komponen utama. Teknologi ini dirancang meniru reaksi di Matahari untuk mengembangkan sumber energi bersih yang berpotensi melimpah.

China menargetkan pembangunan perangkat eksperimen fusi nuklir Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak (BEST), yang dijuluki "matahari buatan", rampung pada akhir 2027. Demonstrasi pembangkitan listrik melalui teknologi tersebut direncanakan berlangsung sekitar 2030. Kompleks proyek BEST di Hefei, Provinsi Anhui, China timur, telah resmi diserahkan dan mulai digunakan. Meski demikian,

pembangunan mesin utama masih berlangsung. Menurut laporan China Central Television (CCTV), proyek tersebut memasuki tahap penting berupa perakitan empat lapisan komponen yang dipasang secara bertingkat. Mengutip Global Times, proses perakitan mesin BEST dapat dibayangkan seperti menyusun termos raksasa dengan beberapa lapisan pelindung.

Di bagian paling dalam terdapat bejana vakum, yakni ruang tempat plasma dipertahankan untuk menjalani reaksi fusi. Di sekelilingnya dipasang pelindung termal dan magnet medan toroidal. Setelah itu, sejumlah komponen presisi dipasang untuk melengkapi perangkat

eksperimen tersebut. Setiap bagian memiliki fungsi penting. Bejana vakum menjadi ruang utama bagi proses fusi, sedangkan pelindung termal membantu membatasi perpindahan panas. Magnet medan toroidal menghasilkan medan magnet kuat untuk mengurung plasma bersuhu sangat tinggi agar tidak bersentuhan langsung dengan dinding bejana. Pengendalian plasma menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan energi fusi karena kondisi ekstrem yang dibutuhkan untuk memicu reaksi tersebut.

Sejak Juli 2026, sejumlah komponen inti BEST telah dikirim ke lokasi pembangunan. Proses

perakitan terus berjalan dan dilaporkan telah melampaui separuh pekerjaan. Setelah konstruksi ditargetkan selesai pada akhir 2027, proyek ini akan memasuki tahapan berikutnya untuk menguji pembangkitan listrik menggunakan reaksi fusi deuterium-tritium sekitar 2030. Eksperimen tersebut dirancang untuk menguji kelayakan teknologi fusi sebagai salah satu pilihan sumber listrik pada masa mendatang.

Fusi nuklir bekerja dengan menggabungkan inti atom ringan menjadi inti yang lebih berat sambil melepaskan energi. Prinsip ini berbeda dari fusi nuklir yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir konvensional, yang menghasilkan energi melalui pemecahan inti atom berat.

Di Matahari, fusi hidrogen berlangsung dalam kondisi tekanan dan suhu ekstrem. Di Bumi, peneliti mengembangkan pendekatan berbeda untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan reaksi serupa terjadi secara terkendali.

Salah satu tantangan terbesarnya adalah mempertahankan plasma, gas bermuatan yang terdiri atas partikel-partikel berenergi tinggi,

pada suhu sangat tinggi tanpa membiarkannya menyentuh dinding perangkat. Karena itu, reaktor tokamak menggunakan medan magnet untuk mengurung plasma.

Keberhasilan mengendalikan reaksi saja belum cukup, peneliti juga harus membuktikan bahwa sistem dapat menghasilkan energi yang berguna, beroperasi secara andal, serta memungkinkan listrik diproduksi dengan biaya yang kompetitif. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **SIDOARJO:** TEGUH A I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** AIS I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **TRENGGALEK:** HERLAMBAH I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Tren Outfit Halloween 2026: KPop Demon Hunters hingga Nikki 'Obsession'

Halloween tak selalu identik dengan kostum menyeramkan, riasan berdarah, atau topeng monster. Perayaan yang jatuh pada 31 Oktober ini juga menjadi kesempatan bagi pencinta film, musik, dan budaya populer untuk mengekspresikan gaya melalui pakaian yang terinspirasi karakter favorit.

Menjelang Halloween 2026, pilihan outfit semakin beragam, mulai dari karakter animasi, superhero, hingga gaya retro awal 2000-an. Salah satu inspirasi yang menarik perhatian adalah karakter Nikki dan Bear dari film *Obsession*.

Selain itu, KPop Demon Hunters, Toy Story, dan karakter gim juga menjadi referensi kostum. Pilihannya tidak harus berupa pakaian khusus Halloween. Perpaduan busana sehari-hari dengan aksesoris dan riasan yang tepat dapat menciptakan tampilan khas tanpa perlu mengeluarkan biaya besar.

Nikki dan Bear dari Obsession

Karakter Nikki Freeman dari film *Obsession* menjadi salah satu inspirasi kostum Halloween 2026. Gaya ini cocok bagi mereka yang ingin tampil dengan referensi film tanpa harus menggunakan riasan horor yang rumit.

Nikki identik dengan gaun floral ungu berpotongan off-shoulder, sedangkan Bear tampil dengan sweater bermotif dan celana santai kotak-kotak. Perpaduan tersebut dapat menjadi pilihan bagi pasangan, sahabat, atau saudara yang ingin

mengenakan kostum duo. Kedua gaya memiliki ciri visual berbeda, tetapi dapat dipadukan tanpa harus menggunakan aksesoris menyeramkan.

Rekomendit menampilkan produk Nikki & Bear Obsession Party Outfit dari Ceressa Label dengan harga Rp300.000 di Shopee saat artikel ditulis. Harga tersebut perlu diperiksa kembali karena dapat berubah sewaktu-waktu. Calon pembeli juga perlu memastikan apakah harga berlaku untuk satu karakter atau satu set pasangan.

Keunggulan gaya ini adalah fleksibilitasnya. Gaun floral dapat digunakan kembali untuk pesta atau acara kasual, sementara sweater dan celana kotak-kotak bisa dipadukan dengan pakaian lain. Dengan demikian, outfit tidak harus berakhir tersimpan di lemari setelah Halloween selesai.

Demon Hunters

Penggemar animasi dan musik Korea dapat memilih kostum yang terinspirasi dari KPop Demon Hunters. Perpaduan busana panggung bergaya K-pop dengan elemen pemburu iblis menghadirkan tampilan yang mencolok dan mudah dikembangkan sesuai karakter pilihan.

Untuk menciptakan penampilan serupa, gunakan pakaian berpotongan tegas, kombinasi warna yang kuat, sepatu bergaya panggung, dan aksesoris yang sesuai. Riasan mata serta penataan rambut dapat memperkuat karakter tanpa harus

membeli kostum lengkap. Konsep ini juga cocok untuk kelompok teman. Setiap orang dapat memerankan karakter berbeda, kemudian menyelaraskan warna dan aksesoris agar penampilan terlihat kompak.

Toy Story dan Superhero

Karakter Woody, Buzz Lightyear, Jessie, dan Slinky Dog dari Toy Story bisa menjadi pilihan bagi pasangan atau keluarga. Kostum Woody, misalnya, dapat dibuat melalui kombinasi kemeja kotak-kotak, rompi, celana panjang, dan topi koboi. Sementara itu, gaya Jessie dapat dibangun melalui kemeja putih, aksesoris merah, celana bergaya koboi, dan topi khasnya.

Bagi pencinta superhero, karakter Spider-Man dan Power Rangers menawarkan pilihan yang mudah dikenali. Penggemar gim juga dapat mengambil inspirasi dari karakter Fortnite atau Halo. Kostum tidak harus berupa replika lengkap. Pakaian dengan warna, potongan, dan aksesoris yang sesuai bisa menjadi alternatif yang lebih praktis.

Gaya Y2K dan Fantasi

Bagi yang tidak ingin mengenakan kostum karakter, gaya Y2K yang terinspirasi mode awal 2000-an dapat menjadi alternatif. Ciri khasnya antara lain atasan berpotongan pendek, rok mini, celana berpotongan rendah, bahan metalik, aksesoris berkilau, kacamata kecil, dan tas bahu mungil. Riasan dengan lip gloss

mengilap serta aksesoris rambut dapat memperkuat nuansa retro. Keuntungannya, sebagian besar item bisa dipakai kembali untuk pesta atau penampilan kasual setelah Halloween.

Pilihan lain adalah kostum bertema fantasi dan horor klasik, seperti vampir, penyihir, karakter mitologi, atau petualang.

Kostum fantasi mengandalkan detail pakaian dan siluet, sedangkan karakter horor dapat diperkuat melalui riasan serta aksesoris. Ada pula kostum humor dengan bentuk unik yang mengandalkan penampilan lucu tanpa membutuhkan riasan rumit.

Sebelum membeli kostum, tentukan konsep dan anggaran. Manfaatkan pakaian yang sudah dimiliki dapat menjadi pilihan ekonomis, sedangkan kostum replika memerlukan perhatian lebih terhadap detail karakter.

Jika berbelanja secara daring, periksa tabel ukuran, bahan, dan isi paket. Pastikan apakah produk dijual satuan atau dalam set.

Untuk pakaian yang terinspirasi film, jangan langsung menganggapnya sebagai produk resmi berlisensi. Periksa keterangan penjual dan informasi produsen jika menginginkan kostum resmi.

Kenyamanan juga perlu diperhatikan. Pilih alas kaki yang sesuai, terutama jika acara berlangsung selama beberapa jam. (far,ist/dya)

Menguji Jejak Dugaandari Hal 1

Perbedaan keterangan mengenai proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 kembali menjadi sorotan. Pangkal persoalannya adalah Pasal 18 ayat (3), yang mengatur persyaratan pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden. Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan keberadaan ketentuan itu dalam draf yang dibahas bersama Komisi II DPR, sedangkan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah pasal tersebut disisipkan tanpa melalui pembahasan.

Doli menyatakan ketentuan tersebut tidak tercantum dalam draf yang diterima Komisi II DPR. Ia mengaku memiliki dokumen, rekaman video, dan catatan yang dapat digunakan untuk menelusuri proses pembahasan. Doli juga mendorong agar persoalan tersebut dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) sehingga kronologi perubahan draf dapat diperiksa secara terbuka.

"Kami tidak pernah menemukan ada apa namanya, pasal itu pada saat dokumen-dokumen itu diserahkan kepada kami," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut keterangan Doli, terdapat surat yang masuk pada 15 September 2023 dan surat lanjutan pada 19 September 2023, menjelang RDP pada 20 September 2023. Ia mempertanyakan bagaimana ketentuan yang dipersiapkan itu kemudian muncul dalam naskah PKPU. Klaim tersebut perlu diuji dengan membandingkan dokumen yang diterima DPR, draf yang dibahas dalam RDP, serta naskah final yang ditetapkan KPU.

Doli juga sudah menyampaikan perihal pasal selundupan itu kepada rekan rekan anggota Komisi II DPR periode 2019-2024. Dia menyebut seluruh anggota Komisi II DPR periode itu tidak pernah menemukan pasal tersebut.

"Nah saya juga sudah konsultasi juga teman-teman Komisi II yang periode yang lalu ya, dalam waktu dekat ini mungkin kami ketemu secara fisik, dan kami mau menyampaikan bahwa apa namanya, memang, memang yang diduga oleh situasi yang ada di Mahkamah Konstitusi itu benar. Kami tidak pernah menemukan ada apa namanya, pasal itu pada saat dokumen-dokumen itu diserahkan kepada kami," ucap dia.

Doli mengakui memang dirinya dan Komisi II DPR sempat menggelar rapat dengan KPU membahas PKPU 19 Tahun 2023 tersebut. Namun, ia tidak terima disebut munafik oleh Hasyim.

"Jadi Saudara Hasyim itu sebenarnya sedang membicarakan atau menjelaskan tentang dirinya sendiri ya. Dia menggunakan kata 'lupa' dan 'munafik'. Dia lupa dia

sudah pernah dua kali dipecat sebagai Ketua KPU karena kemunafikannya gitu. Dan dia menikmati kemunafikan itu," ucap dia.

Doli menyebut Hasyim menikmati kemunafikan terkait pasal selundupan itu sampai saat ini. Dia juga menyinggung jabatan komisaris BUMN yang kini dijabat Hasyim.

"Sekarang sedang menikmati kemunafikan itu. Saya tanya dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN. Coba tanya sama dia itu dapat dari mana komisaris itu, hadiah dari siapa? Gitu kan, dapat komisaris itu," tegas dia.

"Setahu saya beliau tidak punya latar belakang yang berkaitan dengan soal komisaris BUMN, khususnya berkaitan dengan soal perkebunan. Gitu loh. Ya dia harus jelaskan itu, kok bisa dia dapat posisi jadi komisaris itu, ya kan? Nah ini yang harus dicari menurut saya," lanjutnya.

Doli juga mengaku siap buka-bukaan mengenai pasal penyelundupan tersebut. Dia juga mendorong digelar RDP membahas secara khusus pasal penyelundupan itu.

"Cuma karena ini sudah nyebut nama saya pribadi, ya saya harus jelaskan. Kalau memang mau dibuka, ya kita buka. Gitu ya, dan saya sudah siap, saya juga sudah minta sama teman-teman pimpinan Komisi II ya segera digelar saja RDP dengan semua penyelenggara pemilu, kita tunjukkan ke publik mana sebetulnya yang disebut tidak penyelundupan dengan yang disebutkan itu," ujar dia.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi II DPR periode 2019-2024, Guspardy Gaus. Dia mengatakan tidak

ada pembahasan Pasal 18 ayat 3 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur seorang calon presiden atau calon wakil presiden tak perlu menunjukkan bukti lulus SMA dari luar negeri jika punya bukti lulus perguruan tinggi. Ia mengatakan jika hal itu dilakukan oleh KPU dalam rapat dengan Komisi II DPR saat itu, pasti akan ada keributan.

"Jadi seingat Bapak, kalau itu tidak pernah, kalau seandainya itu dibahas. Dijadikan KPU minta dilakukan RDP (rapat dengar pendapat) melakukan konsultasi dan itu jadi topik, pasti ketika itu ribut," kata Guspardy saat dihubungi, Senin (12/10/2026).

Guspardi mengatakan pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden akan menjadi atensi dari anggota Komisi II DPR. Ia mengatakan jika pasal itu dispesialisasikan justru akan menimbulkan pertanyaan di publik. "Masa kalau yang untuk, khusus untuk presiden seluruh persyaratan itu apakah presiden, DPR, Bupati, Wali Kota, Gubernur mengenai ijazah, itu sama aja nggak ada di spesialisasikan. Kalau dispesialisasikan tentu orang bertanya," ujar Guspardy.

"Pasti itu, kenapa? Kenapa ada spesialisasi terhadap ketentuan yang berkaitan terhadap ijazah? Ada apa? Tentu akan menimbulkan berita yang sangat hot pada saat itu, ternyata kan ketika itu nggak ada berita mengenai ini," tambahnya.

Kendati demikian, ia juga meminta penjelasan dari Ketua Komisi II DPR. Ia mengatakan untuk memastikan juga bisa dikonfirmasi mendetail ke Kepala Sekretariat Komisi II DPR saat itu,

Dahlia.

"Tapi untuk lebih akurasinya, lebih baik dikonfirmasi di Komisi II Ibu Dahlia Kepala Sekretariat, minta dokumen yang berkaitan dengan itu atau dengan Pak Doli," tambahnya.

Hasyim Asy'ari membantah tuduhan adanya "pasal selundupan". Ia menyatakan ketentuan tersebut telah dibahas dalam RDP dan sebelumnya tercantum sebagai Pasal 19 ayat (2) dalam draf. Menurut Hasyim, hasil pembahasan dituangkan dalam kesimpulan rapat yang ditandatangani pimpinan lembaga terkait. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa ketentuan tersebut dimasukkan tanpa sepengetahuan DPR.

Hasyim juga mengklaim Doli ikut hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas draf PKPU dan menandatangani kesimpulan rapat. "Tidak benar tuduhan 'penyelundupan pasal' dan 'manipulasi pasal' tersebut. Tidak ada catatan keberatan terhadap Pasal tersebut dari semua pihak peserta RDP," ujar Hasyim.

Hasyim juga menekankan kronologi penetapan aturan. PKPU 19/2023 ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023, sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. Ia berpendapat ketentuan dalam PKPU itu berlaku secara umum, bukan dibuat khusus untuk mengakomodasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Hasyim turut menyebut Gibran telah memiliki surat penyetaraan pada 2019 yang digunakan ketika mengikuti pemilihan kepala daerah di Surakarta. (wid,ist,kum,dtc,rls/dya)

Mahfud: 9 Orang Bisa Diproses Pidana

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan putusan MK yang tidak menerima permohonan terkait perkara ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak otomatis menutup kemungkinan penegakan hukum melalui jalur lain. Ia menyebut sembilan orang berpotensi diduga terlibat tindak pidana bersama-sama apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.

"Sembilan orang itu bisa, bisa diduga telah melakukan tindak pidana bersama-sama," kata Mahfud dalam pernyataannya yang dikutip di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Mahfud, putusan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (N.O.) berkaitan dengan aspek formal permohonan. Putusan tersebut tidak serta-merta menjawab benar atau salahnya seluruh substansi tuduhan yang dipersiapkan. Karena itu, dugaan pelanggaran yang memiliki dasar

hukum masih dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai.

Mahfud turut menyoroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran. Selain itu, pihak di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga dapat diperiksa apabila ditemukan indikasi pelanggaran terkait persyaratan pendidikan. Namun, pemeriksaan m a u p u n p e n e t a p a n pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada bukti, bukan semata-mata polemik di ruang publik.

Ia juga menyinggung kemungkinan pemeriksaan terhadap Gibran apabila terdapat bukti mengenai kesengajaan dalam pemberian keterangan atau penggunaan dokumen yang bermasalah. Meski demikian, Mahfud berpandangan persoalan tersebut tidak tepat diselesaikan dengan mendiskualifikasi Gibran setelah proses pemilihan selesai karena

berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi ketatanegaraan.

Sebagai alternatif, Mahfud menyinggung kemungkinan putusan deklaratif, yakni putusan yang menyatakan keadaan atau status hukum tanpa serta-merta menjatuhkan sanksi diskualifikasi. Menurutnya, persoalan dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan harus dibedakan dari konsekuensi terhadap jabatan wakil presiden.

Mahfud juga membuka kemungkinan pemakzulan melalui mekanisme konstitusional. Namun, pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tuduhan atau pernyataan tokoh. Pasal 7A UUD 1945 mengatur alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. (tin,ist/dya)



HUT ke-81 Jatim, Sinergi dan Potensi Daerah Jadi Modal Menuju Jawa Timur Maju

SURABAYA—Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur menjadi momentum memperkuat optimisme pembangunan melalui sinergi antarlembaga, pengembangan potensi daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kekuatan sektor pertanian, industri, peternakan, perdagangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Jawa Timur terus mengambil peran strategis dalam menopang perekonomian dan ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengapresiasi perkembangan sektor pertanian Jawa Timur. Menurutnya, kekompakan pemerintah daerah menjadi salah satu modal penting dalam mengoptimalkan potensi pertanian dan menjaga pasokan berbagai komoditas pangan untuk kebutuhan masyarakat.

"Jawa Timur berkembang pesat. Saya kagum, luar biasa. Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah daerah kompak. Kalau semuanya kompak, hasilnya bisa terlihat," ungkap Amran dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (12/10/2026).

Ia menyebut Jawa Timur memiliki potensi besar pada berbagai komoditas strategis, mulai dari padi, jagung, telur, daging ayam, gula, hingga susu. Kekuatan tersebut mempertegas peran Jawa Timur sebagai salah satu daerah penting dalam mendukung ketersediaan pangan nasional.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman



Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim dengan agenda Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang berlangsung, Senin (12/10/2026). (Foto:HumasDPRDJatim)



Menurut Amran, potensi tersebut perlu terus dikembangkan melalui dukungan program dan penguatan rantai produksi. Salah satunya melalui program Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Kabupaten Malang, yang dirancang menghubungkan pembibitan, penyediaan pakan, budidaya, pengolahan, hingga distribusi hasil peternakan.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem perunggasan dan meningkatkan nilai tambah sektor peternakan. Pengembangan fasilitas pembibitan, termasuk Grand Parent Stock (GPS), diharapkan turut mendukung ketersediaan bibit ayam untuk memenuhi kebutuhan produksi nasional.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf, menekankan pentingnya mengelola potensi daerah secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Menurutnya, pembangunan perlu terus diarahkan untuk memperkuat perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

"Jawa Timur merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penopang ketahanan pangan Indonesia. Potensi sektor pertanian, kelautan, industri, perdagangan, pariwisata, hingga UMKM harus dikelola secara

profesional, transparan, dan berkeadilan," ujar Musyafak.

Politisi PKB tersebut menyampaikan, keberlanjutan pembangunan membutuhkan kerja bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, hingga generasi muda. Kolaborasi tersebut diperlukan agar potensi daerah dapat berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas.

Musyafak juga mengajak generasi muda Jawa Timur untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menguasai teknologi, dan menjaga integritas. Menurutnya, generasi muda yang kreatif, kompeten, serta memiliki kepedulian sosial merupakan modal penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

"Kepada generasi muda Jawa Timur, mari tingkatkan kapasitas diri, kuasai teknologi, dan jaga integritas. Jawa Timur membutuhkan generasi penerus yang kreatif, kompeten, dan memiliki kepedulian sosial tinggi," katanya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mengajak masyarakat memaknai tema HUT ke-81 Jawa Timur, "Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan", sebagai semangat bersama untuk memperluas

kesempatan dan meningkatkan kesejahteraan.

"Dalam tema Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan, mari kita maknai kemajuan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesempatan dan kesejahteraan," ungkap Deni.

Menurut Politisi PDI Perjuangan tersebut, potensi besar di sektor pertanian, industri, maritim, dan UMKM perlu terus dikembangkan untuk membuka lebih banyak kesempatan ekonomi. Kemajuan daerah, katanya, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan, ketersediaan pekerjaan yang layak, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang.

"Namun, kemajuan sejati akan berarti ketika setiap keluarga memiliki kesempatan hidup lebih baik, anak-anak memperoleh pendidikan berkualitas, dan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak," tegasnya.

Deni juga menekankan pentingnya menjaga gotong royong dan keberagaman sebagai kekuatan Jawa Timur. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi bagian penting untuk merawat kebersamaan sekaligus mendorong kemajuan yang berkelanjutan.

"Mari terus merawat gotong royong, menjaga keberagaman, dan membangun Jawa Timur yang unggul tanpa meninggalkan siapa pun," pungkasnya. (adv,pra/dya)



Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf